

## **ABSTRAK**

Kabupaten Kupang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga ikut melaksanakan otonomi daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Kinerja di sebuah daerah menunjukkan bagaimana pelaksanaan dari otonomi daerah tersebut berjalan sehingga sangat penting untuk dilihat dan diukur. Karena keberhasilan suatu daerah dilihat dari berbagai ukuran kinerja yang telah dicapainya. Oleh karena itu Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dengan menggunakan Analisis Rasio Keuangan yakni Rasio Derajat Desentralisasi Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Keserasian Rasio Pada Tahun 2018-2022 untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penelitian ini menggunakan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dengan mengambil data tersebut pada Website <https://djpk.kemenkeu.go.id> Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kupang.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dari tahun 2018-2022 mendapatkan tingkat rasio kemandirian Sangat Rendah dikarenakan peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada pemerintah daerah.

Rasio Efektivitas dari tahun 2018-2022 mendapatkan hasil tertinggi berada pada tahun 2017 dengan presentase 117.95% dengan kriteria Sangat Efektif, dan terendah berada pada tahun 2018 dengan presentase 66.65% dengan kriteria Tidak Efektif.

Rasio Efisiensi dari tahun 2018-2022 dari tahun 2018-2022 masuk dalam kriteria tidak efisien dan kurang efisien karena berada di atas 60%.

Rasio Keserasian dari tahun 2018-2022 mendapatkan hasil tidak baik karena tingkat keserasian antara dua aspek tersebut rendah atau tidak memadai sehingga mendapatkan hasil yang tidak baik.

Dengan diketahuinya hasil dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektifitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian, maka diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Kupang dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber dana external atau bantuan dari Pemerintah Pusat dengan cara mengelola Pendapatan Asli Daerah secara spesifik yaitu dengan memperbaiki Sistem Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah yang menjadi sumber yang dapat meningkatkan PAD sehingga potensi tersebut dapat dikelola dengan baik untuk meningkatkan PAD Kabupaten Kupang. Dan dapat mempertahankan Efektivitas PAD dengan cara terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan mengenai tingkat pencapaian target Pendapatan Asli Daerah.

Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menggunakan data yang lebih banyak dan memperluas lingkup wilayah penelitian, karena peneliti ini mengambil satu kota/kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Kabupaten Kupang.

**Kata Kunci: Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Rasio Keserasian.**